

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

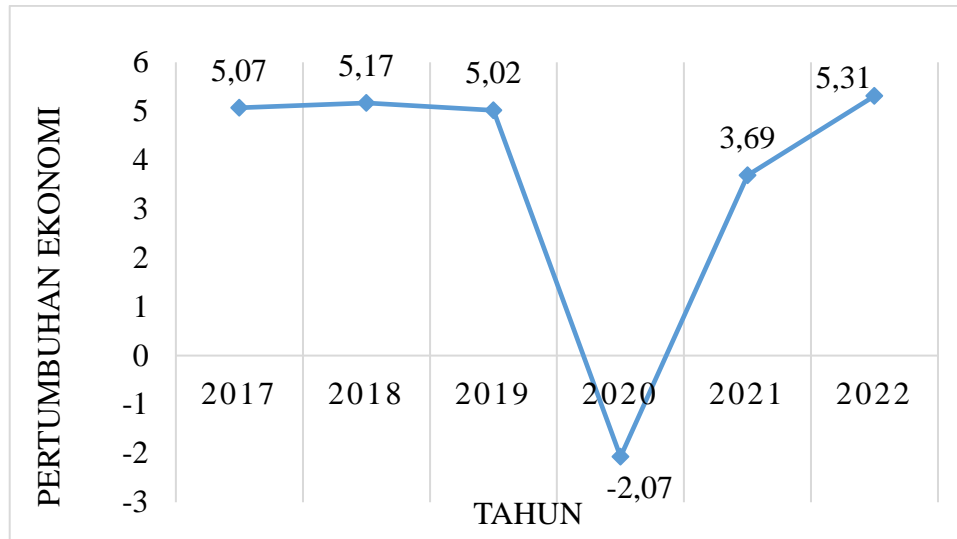
Pertumbuhan ekonomi yaitu suatu keadaan naiknya pendapatan, yang dimana akibat munculnya kenaikan produksi barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat yang penting untuk mengatasi kemiskinan. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak bisa menjadi tolak ukur utama untuk mengatasi kemiskinan, akan tetapi pertumbuhan ekonomi didalam sebuah daerah yang tertuju pada proses perubahan yang lebih baik dan terus menerus guna untuk meningkatkan serta menciptakan lapangan lapangan pekerjaan dan memperbaiki masalah perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang. Menurut Sukirno, (2010) perekonomian dapat dikatakan tumbuh jika balas jasa riil atas faktor-faktor produksinya pada tahun tertentu lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Gambaran kasar tentang ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya menggunakan tingkat PDB yang dicapai oleh negara tersebut.

Secara umum, pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menghitung presentase peningkatan dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang diikuti oleh pengentasan kemiskinan, peningkatan ketimpangan pendapatan dan memastikan lapangan kerja yang memadai. Meski pertumbuhan ekonominya yaitu pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat tanpa perubahan struktur ekonomi. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia berusaha memperbaiki kondisi perekonomian dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, akan segera menjadi pencapaian distribusi pendapatan dengan

adanya pemerataan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Kirana, 2022).

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan dan merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan dari beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat oleh negara-negara di dunia menjadi salah satu syarat utama untuk mengetaskan kemiskinan (Asfar et al., 2022).

Bisa dilihat salah satu indikator kemajuan suatu pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya indikator ini digunakan dalam sebuah negara sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar output dalam laju yang lebih besar dari pada tingkat pertumbuhan penduduknya. Selain itu ketersediaan indikator pembangunan ekonomi menjadi hal yang penting dalam perencanaan pembangunan demi mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan perkapita masyarakat tanpa memandang perubahan dalam struktur ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki kondisi ekonomi dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Muqorrobin et al., 2017).



Sumber Data Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2022 (Persen)

Pertumbuhan ekonomi suatu negara mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya. Data pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2017-2022 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5.07%, dikarenakan adanya persoalan makroekonomi yang belum terselesaikan seperti tumbuhnya ekspor Indonesia yang tidak dibarengi dengan peningkatan industri, pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 5.17%, kenaikan ini disebabkan pemerintah domestik terutama dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5.02%, penurunan ini disebabkan konsumsi rumah tangga yang menurun, ekspor terhadap pertumbuhan juga menurun, tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan karena pandemi Covid-19, menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -2.07%.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi pulih sebesar 3.69% dikarenakan adanya perbaikan aktivitas produksi, sehingga seluruh sektor ekonomi mengalami

pertumbuhan yang positif dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 5.31% dikarenakan adanya peningkatan investasi, baik domestik maupun asing dan pemulihan ekonomi global yang mendukung ekspor Indonesia, sehingga kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia di setiap Negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut di harapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan ada heterogenitas (keberagaman) individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan, namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya sosial (Dewi et al., 2017).

BPS 2018, menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang utama pembangunan manusia, yaitu harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Aspek harapan hidup indikatornya adalah angka harapan hidup, data area indikator adalah lama pendidikan yang diharapkan rata-rata lama pendidikan, standar hidup indikator disesuaikan dengan pengeluaran per orang.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur

mutu modal manusia, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber Data Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2022 (Persen)

Dapat dilihat dari Gambar 1.2 di atas, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selama periode 2017-2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70.81%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 71.39% peningkatan tersebut didukung oleh Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun dapat menjadi indikasi adanya kemajuan dalam sektor-sektor yang memengaruhi indeks tersebut, seperti pendidikan, kesehatan dan standar hidup dapat membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada tahun 2019-2021 indeks pembangunan manusia Indonesia terus meningkat hingga mencapai 72.29% dikarenakan mulai membaiknya wabah Covid-19.

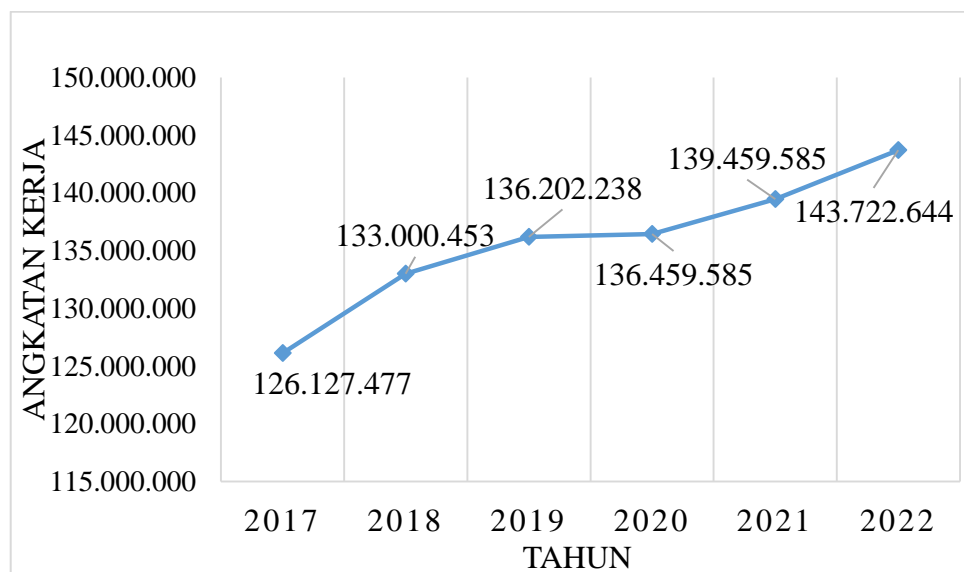
Pada tahun 2022 perkembangan indeks pembangunan manusia yang meningkat setiap tahunnya ini tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara fluktuatif, bahkan ketika adanya Covid-19, ini menandakan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan tetapi indeks pembangunan terus mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan diukur angka usia harapan hidup, dimensi pendidikan diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan rata-rata lama sekolah dan dimensi daya beli yang memiliki standar hidup layak diukur dari perintis daya beli UNDP, (2004). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Brata, (2004) dalam (Dewi et al., 2014).

Berdasarkan pendapat IPM yang sesuai dengan penelitian, bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, atau semakin tinggi indeks pembangunan manusia maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian, (Dewi, 2014; Elistia, 2018; Siti et al., 2021; Habibah, 2022; Giri et al., 2022; Panjaitan, 2022; Nawawi et al., 2022; Saleh et al., 2022). Peningkatan indeks pembangunan manusia ditandai oleh umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak yang memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi dalam suatu negara meningkatnya aktivitas ekonomi dalam suatu negara akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pendapat ipm yang berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, (Bagas et al., 2022; Muqorrobin, 2017), apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Peningkatan indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 19.29% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor umur harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak (Muqorrobin, 2017).

Tenaga kerja juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi (Hasan et al., 2013).



Sumber Data Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 1.3 Angkatan Kerja Tahun 2017-2022 (Juta Jiwa)

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, menyatakan bahwa perkembangan angkatan kerja di Indonesia selama periode 2017-2022 terus meningkat walaupun bertahap cukup lambat, tapi tidak dapat dipungkiri angkatan kerja di Indonesia

sudah cukup baik. Pada tahun 2017 angkatan kerja sebanyak 126.127.477 jiwa, pada tahun 2018 angkatan kerja sebanyak 133.000.453 jiwa, pada tahun 2019 angkatan kerja sebanyak 136.202.238 jiwa, pada tahun 2020 angkatan kerja sebanyak 136.459.585 jiwa, pada tahun 2021 angkatan kerja sebanyak 139.459.585 jiwa dan pada tahun 2022 angkatan kerja sebanyak 143.722.644 jiwa, ini menjadi angkata kerja tertinggi di 5 tahun terakhir.

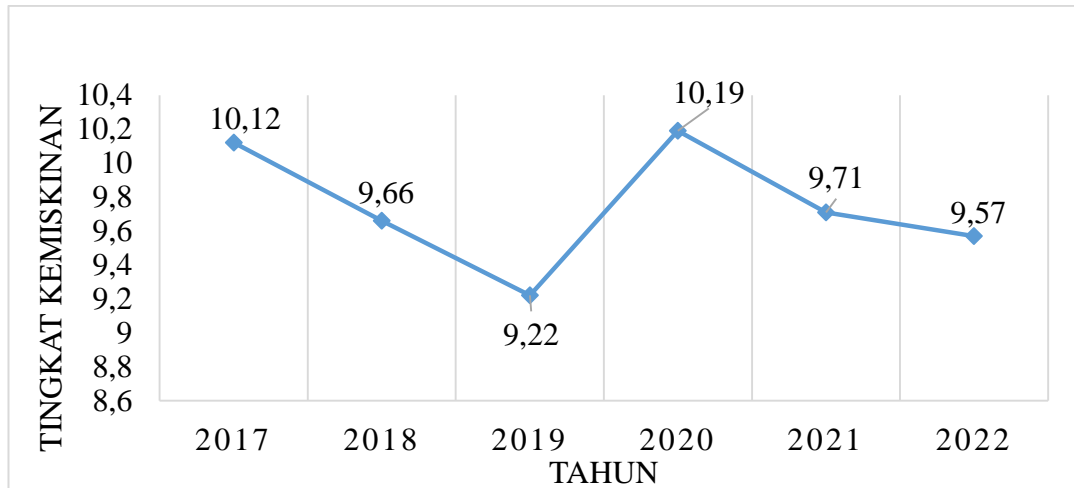
Penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga memiliki dampak negatif terhadap jumlah tenaga kerja, akibatnya aktivitas ekonomi mengalami penurunan dan banyak dari pelaku usaha yang melakukan efisiensi untuk mengurangi kerugian, dan ini berakibat banyak pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK. Jumlah angkatan kerja tahun 2019 sebanyak 136.202.238 jiwa, dan 2020 angkatan kerja sebanyak 136.459.585 jiwa, dapat dilihat angkatan kerja di Indonesia mengalami pelambatan pada tahun tersebut karena terjadinya wabah Covid-19. Sehingga di era wabah Covid-19 aktivitas produksi mengalami penurunan dan jumlah angkatan kerja tahun 2022 ini meningkat sebanyak 143.722,644 yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti pertumbuhan populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja dan kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi tenaga kerja seperti, program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja dapat menjadi penyebab dari penambahan jumlah angkatan kerja.

Menurut Munthe, (2019) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang

cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Berdasarkan pendapat angkatan kerja yang sesuai dengan penelitian bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, (Hasan et al. 2013; Eliza, 2015; Arta, 2013; Puspasari, 2019; Syamsuddin et al., 2021; Huang, 2019; Amir, 2015; Paudel, 2009; Al-Hamli, 2013; Junaidi, 2023). Angkatan kerja merupakan masyarakat yang sudah masuk dalam katagori bekerja yang artinya banyak angkatan kerja yang sudah bekerja dari pada belum bekerja karena para angkatan kerja melakukan kegiatan aktivitas ekonomi seperti produksi sehingga, berdampak terhadap aktivitas produksi yang meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan pendapatan perkapita sehingga, pertumbuhan ekonomi meningkat. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi angkatan kerja maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dengan asumsi bahwa angkatan kerja tersebut lebih banyak yang sudah bekerja.

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak dampak negatif yang dihasilkan dari kemiskinan, antara lain menimbulkan masalah sosial dan ekonomi (Saputra, 2011).



Sumber Data Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 1.4 Tingkat Kemiskinan Tahun 2017- 2022 (Persen)

Dapat dilihat dari Gambar 1.4 di atas, data Tingkat Kemiskinan Indonesia selama periode 2017-2022 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2017 sebesar 10.12%, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 9.66% dan pada tahun 2019 terus menurun menjadi 9.22%. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 10.19% ini disebabkan adanya faktor covid-19 yang berdampak pada peningkatan kemiskinan, kurangnya produktivitas, banyaknya pekerja yang di PHK, sehingga menyebabkan turunnya konsumsi yang berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan, hingga pada tahun 2022 menurun menjadi 9.57%, karena upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan akibat pandemik Covid-19.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Tingkat kemiskinan menggambarkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total suatu daerah. Tingkat kemiskinan erat

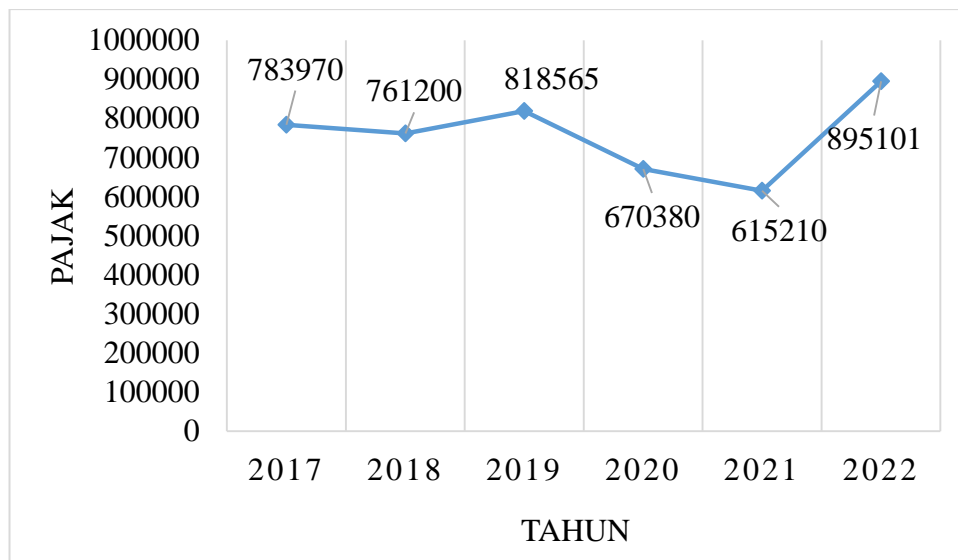
hubungannya dengan disparitas kemiskinan suatu daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran BPS, (2017).

Berdasarkan pendapat tingkat kemiskinan yang sesuai dengan penelitian bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, (Novriansyah, 2018; Efendi, 2019; Imanto, 2020; Wadana, 2021; Ma'wa, 2023). Pertumbuhan ekonomi tetap terjadi meskipun kemiskinan juga meningkat dikarenakan dalam kegiatan ekonomi, faktor produksi disinergikan untuk menciptakan nilai tambah dimana minimnya penduduk miskin terhadap faktor produksi menyebabkan akses terhadap nilai tambah juga minim. Hal ini sejalan dengan penelitian Adelowokan et al., (2019), dalam Wadana, (2021) bahwa meskipun ada populasi miskin yang ditentukan oleh angka absolut, output suatu negara akan meningkat. Meskipun jumlah penduduk miskin meningkat perekonomian akan terus tumbuh dan dalam jangka pendek jumlah penduduk miskin meningkat dari tahun ke tahun perekonomian tetap tumbuh. Perlu adanya kebijakan makroekonomi yang stabil untuk menjamin pemerataan pendapatan sehingga masyarakat miskin juga mendapat manfaat dari pertumbuhan negara.

Berdasarkan pendapat hasil penelitian tingkat kemiskinan apabila tingkat kemiskinan berpengaruh negatif maka kemiskinan akan menurunkan daya beli masyarakat, yang mana daya beli masyarakat berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, (Okoroafor, 2013; Baghebo, 2015; Asrol, 2018; Parmadi, 2019; Priambodo, 2020).

Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara dan memiliki kontribusi yang besar dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintah karena dengan tingginya tingkat penerimaan pajak yang diterima pemerintah akan memperlancar dalam melakukan pembangunan yang merata sehingga roda pemerintah semakin lancar (Sihaloho, 2020).



Sumber Data Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 1.5 Pajak Tahun 2017- 2022 (Miliar)

Dapat dilihat dari Gambar 1.5 di atas, data pajak di Indonesia selama periode 2017-2022. Total pajak yang terkumpul pada tahun 2017 sebesar 783.970 miliar, mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 761.200 miliar, namun meningkat pada tahun 2019 menjadi 818.565 miliar. Selanjutnya, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 670.380 miliar, tetapi mengalami pemulihan pada tahun

2021 menjadi 615.210 miliar, dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 895.101 miliar.

Dapat dilihat pada tahun 2020 pajak menurun sebesar 670.380 miliar yang dipengaruhi oleh dampak covid-19 terhadap kegiatan ekonomi dan pendapatan perusahaan. Kemudian pemulihan pada tahun 2021-2022 meningkat sebesar 895.101 miliar karena kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi atau faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, membantu merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu kebijakan makroekonomi yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian perekonomian adalah kebijakan fiskal dalam kebijakan fiskal akan dibuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Untuk membiayai pengeluarannya, pemerintah mengenakan berbagai jenis pajak kepada rumah tangga dan perusahaan. Pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung Sukirno, (2015). Jenis-jenis pajak yang tergolong dalam pajak langsung adalah pajak pendapatan perseorangan dan pajak perusahaan. Sedangkan, pajak yang termasuk golongan pajak tidak langsung adalah pajak penjualan dan pajak impor atau ekspor.

Penyebab realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak di Indonesia yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pentingnya peranan pajak. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Administrasi perpajakan dan reformasi sistem perpajakan sebagai komponen utama dalam usaha

suatu negara dalam menghimpun pajak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ali et al., (2018), mereka berpendapat bahwa kedua usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan mengurangi masalah toleransi pajak dan penghindaran pajak.

Berdasarkan pendapat hasil penelitian pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, apabila pajak meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Macek, 2015; Saragih, 2018; Sihaloho, 2020; Miswa, 2021; Emmanuel, 2021; Sahelangi, 2023). Apabila ditinjau dari sudut pandang teori keagenan, kemungkinan besar sifatnya cukup rendah, pada saat penerimaan pajak daerah telah melebihi target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan keagenan cukup rendah karena para wajib melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Rendahnya konflik keagenan ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi maju lebih pesat. Hal ini juga dapat terlihat pada tren peningkatan penerimaan pajak daerah dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pendapat hasil penelitian pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, apabila pajak meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun, maka diperlukan dukungan kesinambungan penerimaan pajak sebaiknya dimanfaatkan untuk mendanai proyek yang produktif sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mina, 2020; Gaur, 2020; Maghfirah, 2022; Khan, 2022). Sejauh ini banyak penelitian tentang indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, tingkat kemiskinan dan pajak.

Novelty atau keterbaruan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan penelitian penelitian terdahulu Syofria, (2021), meneliti tentang ipm, investasi, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model regresi data panel. Wadana, (2021), meneliti tentang infrastruktur, kemiskinan, ipm dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model regresi data panel. Asfar et al., (2022), meneliti tentang investasi, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan metode ARDL. Murtala et al., (2023), meneliti tentang tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan model ARDL. Satoto, (2023), meneliti tentang pajak daerah, indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan Smart PLS 3.0 untuk pengujian analisis statistik. Junaidi, (2023), meneliti tentang ICOR dan indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan model regresi data panel. Yusnuri, (2023), meneliti tentang *Analysis Of Human Development Index, Unemployment And Poverty On Economic Growth In Indonesia* dengan menggunakan model regresi linier berganda. Minaa, (2020), meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah di (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan model regresi linier berganda. Asmoro, (2022), Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2021 dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Nor, (2023) meneliti tentang Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2019 dengan

menggunakan model regresi data panel. Sufnirayanti, (2023), meneliti tentang Pengaruh Investasi, Pajak Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dengan menggunakan model regresi linier berganda. Di antara penelitian tersebut belum ada yang memposisikan ipm, angkatan kerja, tingkat kemiskinan dan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dari penelitian sebelumnya peneliti ini menambahkan variabel pajak dan jumlah tahun observasi 5 sampai 32 tahun maka peneliti ini menambah menjadi 33 tahun.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, Tingkat Kemiskinan, dan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, menggunakan data dan tahun 1990 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, peneliti ini menggunakan variabel pajak.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Seberapa besar pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

3. Seberapa besar pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Seberapa besar pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Mengetahui pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menambah manfaat atau masukan mengenai perkembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi publik untuk mengetahui bagaimana strategi yang

diterapkan dalam perekonomian serta bagaimana penerapannya. Sebagai acuan peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah Provinsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia dan provinsi yang ada di Indonesia.